



## Faktor Pendorong Sekolah Menengah Baru di Era Zonasi: Analisis Peluang dan Tantangan di Kota Jayapura

Lazarus Ramandei <sup>1</sup>, Geelvinka M. Catharine <sup>2</sup>, Miracle O. Phaulhentje <sup>3</sup>, Cornelicha Cornelicha M. Alberthine Ramandey <sup>4\*</sup>

<sup>1</sup> Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Cenderawasih,

<sup>2</sup> Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Cenderawasih, Indonesia

<sup>3</sup> Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Cenderawasih, Indonesia

<sup>4</sup> SMA Negeri 4 Jayapura, Indonesia

\*Penulis korespondensi : [icharamandey@gmail.com](mailto:icharamandey@gmail.com)

**Abstract.** The implementation of the zoning system since 2017 has triggered significant transformation in the secondary education landscape in Jayapura City, including the emergence of new secondary schools as a response to policy changes. This study aims to analyze the factors that trigger the proliferation of new secondary schools in Jayapura City during the zoning era and identify the opportunities and challenges that accompany it. Using a qualitative approach with case study methods, this research involved in-depth interviews with 35 key informants including education providers, local government, and community representatives, as well as analysis of licensing documents and educational statistics data for the 2017-2024 period. The results showed a significant increase in the number of secondary schools in Jayapura City from 68 units in 2017 to 89 units in 2024, representing growth of 30.9%. The main factors triggering the emergence of new schools include: limited capacity of existing schools within the zoning system, profitable education business opportunities due to excess demand, demands for geographical equity in education access particularly in peripheral areas, resistance to the zoning system from upper-middle economic groups seeking quality alternatives, and diversification needs for specialized education programs. Identified opportunities include improved access to education in underserved areas, increased infrastructure investment totaling Rp 189.5 billion, and healthy competition driving educational innovation. Main challenges include quality disparities between schools, potential fragmentation of the education system, operational sustainability issues affecting 14.3% of new schools, and shortage of 546 qualified teaching staff. The research recommends the need for stricter regulations on the establishment of new schools, comprehensive accreditation systems, and integration strategies for new schools in a sustainable zoning education ecosystem that ensures equitable access to quality education.

**Keywords:** driving factors; educational transformation; new schools; zoning era; zoning system.

**Abstrak.** Implementasi sistem zonasi sejak tahun 2017 telah memicu transformasi signifikan dalam lanskap pendidikan menengah di Kota Jayapura, termasuk munculnya sekolah-sekolah menengah baru sebagai respons terhadap perubahan kebijakan pendidikan nasional. Sistem zonasi yang menekankan kedekatan geografis sebagai faktor utama penerimaan siswa telah mengubah dinamika supply dan demand dalam ekosistem pendidikan, menciptakan peluang sekaligus tantangan baru bagi pengembangan institusi pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memicu proliferasi sekolah menengah baru di Kota Jayapura era zonasi serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang menyertainya untuk merumuskan rekomendasi strategis. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan 35 informan kunci termasuk penyelenggara pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta analisis dokumen perizinan dan data statistik pendidikan periode 2017-2024. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan jumlah sekolah menengah di Kota Jayapura dari 68 unit pada tahun 2017 menjadi 89 unit pada tahun 2024, dengan pertumbuhan 30,9%. Faktor-faktor utama yang memicu munculnya sekolah baru meliputi: keterbatasan daya tampung sekolah existing dalam sistem zonasi, peluang bisnis pendidikan yang menguntungkan akibat excess demand, tuntutan pemerataan geografis akses pendidikan khususnya di wilayah pinggiran, resistensi terhadap sistem zonasi dari kelompok ekonomi menengah atas yang mencari alternatif berkualitas, dan kebutuhan diversifikasi program pendidikan khusus. Peluang yang teridentifikasi mencakup peningkatan akses pendidikan di wilayah kurang terlayani, peningkatan investasi infrastruktur mencapai Rp 189,5 miliar, dan kompetisi sehat yang mendorong inovasi pendidikan. Tantangan utama meliputi disparitas kualitas antarsekolah, potensi fragmentasi sistem pendidikan, masalah sustainability operasional yang mempengaruhi 14,3% sekolah baru, dan kekurangan 546 tenaga pendidik berkualitas. Penelitian merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih ketat

terhadap pendirian sekolah baru, sistem akreditasi yang komprehensif, dan strategi integrasi sekolah baru dalam ekosistem pendidikan zonasi yang berkelanjutan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas.

**Kata kunci:** era zonasi; faktor pendorong; sekolah baru; sistem zonasi; transformasi pendidikan.

## 1. LATAR BELAKANG

Implementasi sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru yang dimulai sejak tahun 2017 melalui Permendikbud No. 17 Tahun 2017 dan diperkuat melalui Permendikbudristek No. 1 Tahun 2021 telah menciptakan gelombang transformasi yang signifikan dalam lanskap pendidikan Indonesia. Kebijakan ini dirancang untuk mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan, menghilangkan diskriminasi, serta mencegah segregasi sekolah berdasarkan kemampuan akademik dan ekonomi siswa. Salah satu fenomena menarik yang muncul sebagai konsekuensi dari kebijakan ini adalah proliferasi atau pertumbuhan pesat sekolah-sekolah menengah baru di berbagai daerah, termasuk di Kota Jayapura sebagai ibu kota Provinsi Papua.

Fenomena munculnya sekolah-sekolah baru ini tidak dapat dipandang sebagai kejadian yang berdiri sendiri, melainkan merupakan respons sistemik terhadap perubahan fundamental dalam mekanisme akses pendidikan. Sistem zonasi yang menekankan kedekatan geografis sebagai faktor utama penerimaan siswa dengan alokasi minimal 50% untuk jalur zonasi telah mengubah dinamika supply dan demand dalam ekosistem pendidikan, menciptakan peluang sekaligus tantangan baru bagi pengembangan institusi pendidikan (Wardani & Sari, 2022). Perubahan ini memicu reaksi berantai dalam sistem pendidikan yang melibatkan berbagai stakeholder mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat.

Kota Jayapura, dengan karakteristik geografis yang unik berupa topografi berbukit dan terbagi oleh Danau Sentani, serta keragaman sosial ekonomi masyarakatnya yang mencerminkan heterogenitas Papua, menghadirkan kompleksitas tersendiri dalam implementasi sistem zonasi. Kondisi geografis yang menantang, dengan jarak antarwilayah yang relatif jauh dan aksesibilitas transportasi yang terbatas, menciptakan dinamika khusus yang memicu munculnya sekolah-sekolah menengah baru sebagai upaya mengakomodasi kebutuhan pendidikan yang tidak dapat dipenuhi oleh sekolah-sekolah existing dalam sistem zonasi yang baru.

Data awal dari Dinas Pendidikan Kota Jayapura menunjukkan adanya peningkatan jumlah sekolah menengah yang cukup signifikan sejak implementasi sistem zonasi, baik sekolah negeri maupun swasta. Peningkatan ini tidak hanya dalam aspek kuantitas, tetapi juga diversifikasi program dan pendekatan pendidikan yang ditawarkan. Munculnya sekolah-

sekolah baru ini mencerminkan interaksi kompleks antara berbagai faktor, mulai dari tekanan demografis akibat pertumbuhan penduduk usia sekolah, aspirasi masyarakat terhadap pendidikan berkualitas yang semakin tinggi, peluang ekonomi yang menjanjikan dalam sektor pendidikan, hingga adaptasi strategis terhadap keterbatasan yang ada dalam sistem zonasi.

Dalam konteks nasional, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa implementasi sistem zonasi memang memicu perubahan struktural dalam ekosistem pendidikan. Kurniawan dan Sari (2022) dalam penelitiannya di Jakarta menemukan bahwa sistem zonasi mendorong munculnya 127 sekolah swasta baru dalam periode 2017-2021. Sementara itu, Rahman et al. (2022) mengidentifikasi bahwa sektor pendidikan swasta mengalami pertumbuhan 23% secara nasional sejak implementasi zonasi, menunjukkan responsivitas tinggi sektor privat terhadap perubahan kebijakan pendidikan.

Penelitian terdahulu tentang dampak sistem zonasi umumnya fokus pada aspek pemerataan akses dan mobilitas siswa, seperti studi Hakim dan Mulyani (2023) tentang distribusi siswa antarsekolah, atau penelitian Pratiwi dan Setiawan (2023) tentang kualitas output pendidikan. Namun, masih terbatas yang mengkaji secara khusus fenomena munculnya institusi pendidikan baru sebagai respons terhadap kebijakan zonasi, terutama dalam konteks daerah dengan karakteristik geografis dan sosial yang unik seperti Papua.

Dalam konteks Papua yang memiliki tantangan khusus dalam pembangunan pendidikan, termasuk keterbatasan infrastruktur transportasi dan komunikasi, jarak geografis yang jauh antarwilayah, keragaman budaya dan bahasa lokal, serta disparitas ekonomi yang tinggi, fenomena munculnya sekolah baru memiliki implikasi yang lebih kompleks dibandingkan daerah lain. Keberhasilan integrasi sekolah-sekolah baru ini dalam sistem pendidikan daerah akan sangat menentukan pencapaian tujuan pemerataan pendidikan yang berkelanjutan dan inklusif.

Gap penelitian yang teridentifikasi adalah belum adanya analisis komprehensif tentang faktor-faktor spesifik yang memicu proliferasi sekolah menengah baru di era zonasi, khususnya di wilayah dengan karakteristik geografis dan sosial seperti Kota Jayapura. Pemahaman yang mendalam terhadap dinamika ini menjadi penting untuk memastikan bahwa transformasi sistem pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan zonasi yaitu pemerataan akses pendidikan berkualitas tanpa menciptakan masalah baru seperti fragmentasi sistem atau ketimpangan kualitas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif faktor-faktor yang memicu munculnya sekolah menengah baru di Kota Jayapura sejak implementasi sistem zonasi, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang menyertai fenomena ini, serta

merumuskan rekomendasi strategis untuk optimalisasi pengembangan sekolah menengah yang berkelanjutan dan berkualitas. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap dinamika ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang tepat untuk memastikan bahwa proliferasi sekolah baru berkontribusi positif terhadap pencapaian tujuan pemerataan pendidikan berkualitas di Papua.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Teori Ekonomi Pendidikan dan Dinamika Supply-Demand

Teori ekonomi pendidikan menjelaskan bahwa permintaan terhadap layanan pendidikan dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas, kualitas, dan harga (Becker, 1993). Dalam konteks sistem zonasi, pembatasan akses geografis terhadap sekolah favorit menciptakan excess demand yang tidak dapat dipenuhi oleh supply existing, sehingga membuka peluang bagi penyedia layanan pendidikan baru untuk mengisi gap tersebut. Konsep ini sejalan dengan hukum ekonomi dasar bahwa ketika demand melebihi supply pada tingkat harga tertentu, akan muncul insentif untuk meningkatkan supply melalui entry pemain baru.

Friedman (1962) dalam karyanya tentang *freedom of choice* dalam pendidikan menjelaskan bahwa ketika sistem pendidikan membatasi pilihan dalam sektor publik, sektor swasta akan merespons dengan menyediakan alternatif yang memenuhi preferensi konsumen yang tidak terakomodasi. Hal ini terlihat jelas dalam fenomena Jayapura dimana pembatasan akses melalui zonasi memicu munculnya sekolah-sekolah swasta dengan berbagai program unggulan.

### New Institutional Economics dan Adaptasi Institusional

Teori New Institutional Economics (North, 1990) menjelaskan bahwa perubahan aturan formal (sistem zonasi) akan memicu adaptasi institusional yang mencakup munculnya institusi-institusi baru untuk merespons ketidakseimbangan yang terjadi. Williamson (1985) menambahkan bahwa respons institusional ini akan mengikuti prinsip efisiensi transaksi, dimana institusi baru akan muncul di tempat-tempat yang dapat memberikan value proposition terbaik kepada stakeholder.

Hal ini sejalan dengan temuan Rahman et al. (2022) yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan zonasi telah memicu transformasi struktural dalam ekosistem pendidikan nasional. Adaptasi institusional ini tidak hanya berupa pendirian sekolah baru, tetapi juga perubahan strategi existing institutions untuk mempertahankan competitive advantage mereka.

### **Teori Segregasi dan Stratifikasi Pendidikan**

Konsep segregasi pendidikan yang dikembangkan oleh Coleman et al. (1966) menjadi relevan dalam konteks proliferasi sekolah swasta era zonasi. Meskipun sistem zonasi dirancang untuk mengurangi segregasi berdasarkan kemampuan akademik dan ekonomi, munculnya sekolah-sekolah swasta dengan tingkat biaya yang beragam berpotensi menciptakan bentuk segregasi baru berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga (Rosyid & Anggraini, 2023).

Bourdieu (1986) dalam teori capital cultural menjelaskan bahwa keluarga dengan modal ekonomi dan budaya yang tinggi akan selalu mencari cara untuk mempertahankan advantage mereka dalam sistem pendidikan. Sistem zonasi yang membatasi akses ke sekolah favorit mendorong kelompok ini untuk mencari alternatif melalui sekolah swasta berkualitas tinggi, yang pada akhirnya dapat menciptakan stratifikasi baru dalam sistem pendidikan.

### **Spatial Equity Theory dalam Pendidikan**

Teori spatial equity dalam pendidikan menekankan pentingnya distribusi geografis fasilitas pendidikan yang merata untuk memastikan keadilan akses (Talen, 2001). Konsep ini menjadi dasar filosofis sistem zonasi yang bertujuan memastikan setiap anak dapat mengakses pendidikan berkualitas di dekat tempat tinggalnya tanpa harus melakukan mobilitas geografis yang tinggi.

Harvey (1973) dalam teori social justice and the city menjelaskan bahwa distribusi spasial fasilitas publik, termasuk sekolah, mencerminkan struktur kekuasaan dan keadilan dalam masyarakat. Implementasi sistem zonasi di Jayapura menciptakan tuntutan untuk pemerataan geografis yang memicu pendirian sekolah-sekolah baru di wilayah-wilayah yang sebelumnya kurang terlayani, sejalan dengan prinsip distributive justice.

### **Teori Inovasi dan Difusi dalam Pendidikan**

Rogers (2003) dalam teori diffusion of innovations menjelaskan bahwa inovasi dalam sistem pendidikan akan menyebar melalui adopter categories yang berbeda. Sekolah-sekolah baru seringkali berperan sebagai early adopters atau innovators dalam mengimplementasikan program-program pendidikan baru yang kemudian diadopsi oleh sekolah-sekolah existing.

Christensen et al. (2008) dalam konsep disruptive innovation dalam pendidikan menjelaskan bahwa munculnya institusi pendidikan baru dengan model yang berbeda dapat mendisrupsi existing institutions dan mendorong peningkatan kualitas sistem secara keseluruhan. Hal ini terlihat dalam kompetisi yang sehat antara sekolah baru dan lama di Jayapura.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **Pendekatan dan Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis fenomena munculnya sekolah menengah baru di Kota Jayapura dalam konteks implementasi sistem zonasi. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dinamika sosial, ekonomi, dan kebijakan yang kompleks di balik fenomena proliferasi sekolah baru (Creswell & Poth, 2018). Studi kasus dipilih karena fenomena yang diteliti terjadi dalam konteks real-life yang spesifik dan membutuhkan pemahaman holistik tentang interaksi berbagai faktor.

Desain penelitian menggunakan single-case study dengan embedded units analysis, dimana Kota Jayapura sebagai kasus utama dengan lima distrik (Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram, dan Muara Tami) sebagai unit analisis yang tertanam. Pendekatan ini memungkinkan analisis komparatif antardistrik untuk memahami variasi pola munculnya

#### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kota Jayapura, Provinsi Papua, selama periode Oktober 2023 hingga Maret 2024, dengan fokus analisis pada perkembangan sekolah menengah periode 2017-2024 sejak implementasi sistem zonasi. Lokasi penelitian mencakup lima distrik di Kota Jayapura dengan karakteristik geografis dan sosioekonomis yang beragam, yaitu Distrik Jayapura Utara (pusat kota dengan konsentrasi sekolah tinggi), Jayapura Selatan (zona transisi), Abepura (zona pendidikan tinggi), Heram (zona pinggiran dengan pertumbuhan sekolah tinggi), dan Muara Tami (zona terluar dengan akses terbatas).

Pemilihan periode analisis 2017-2024 didasarkan pada timeline implementasi sistem zonasi yang dimulai tahun 2017, sehingga memungkinkan analisis before-after yang komprehensif terhadap perubahan lanskap pendidikan menengah di Jayapura.

#### **Subjek dan Teknik Sampling**

Subjek penelitian terdiri dari 35 informan kunci yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap fenomena yang diteliti. Kriteria pemilihan informan meliputi: keterlibatan langsung dalam proses pendirian atau pengelolaan sekolah baru, pemahaman mendalam tentang kebijakan zonasi dan implementasinya, representasi berbagai perspektif stakeholder, dan kesediaan untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Komposisi informan meliputi: Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura dan staf bidang terkait (3 orang) untuk perspektif kebijakan dan regulasi, penyelenggara/pendiri sekolah menengah baru periode 2017-2024 (12 orang) untuk memahami motivasi dan tantangan

pendirian sekolah, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah menengah baru (8 orang) untuk perspektif operasional dan manajemen, tokoh masyarakat dan komite sekolah (6 orang) untuk memahami respons dan dukungan komunitas, serta orang tua siswa dari berbagai latar belakang ekonomi (6 orang) untuk perspektif pengguna layanan pendidikan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data menggunakan triangulasi metode yang terdiri dari empat teknik utama:

Wawancara Mendalam Semi-Terstruktur dilakukan dengan seluruh informan menggunakan panduan wawancara yang telah divalidasi melalui expert judgment. Setiap wawancara berlangsung 60-90 menit dan direkam dengan persetujuan informan. Panduan wawancara disesuaikan dengan kategori informan tetapi mencakup tema-tema umum: persepsi terhadap sistem zonasi, faktor-faktor pendorong pendirian sekolah baru, peluang dan tantangan yang dihadapi, serta proyeksi masa depan.

Observasi Partisipatif dilakukan terhadap aktivitas sekolah-sekolah baru, proses pembelajaran, fasilitas yang tersedia, dan interaksi antarstakeholder. Observasi juga mencakup pengamatan terhadap proses pendirian sekolah yang sedang berlangsung dan rapat-rapat komite sekolah. Total waktu observasi mencapai 120 jam dengan dokumentasi melalui field notes dan fotografi.

Studi Dokumentasi meliputi analisis dokumen perizinan sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Jayapura, proposal pendirian sekolah, laporan akreditasi dari BAN-S/M Provinsi Papua, data statistik pendidikan periode 2017-2024, laporan keuangan sekolah yang tersedia, dan dokumen kebijakan terkait zonasi. Analisis dokumen menggunakan content analysis untuk mengidentifikasi pola dan tren.

Focus Group Discussion dilakukan dalam tiga sesi terpisah: FGD dengan penyelenggara pendidikan swasta (8 peserta), FGD dengan perwakilan masyarakat dari berbagai distrik (6 peserta), dan FGD dengan guru-guru sekolah baru (8 peserta). Setiap FGD berlangsung 120 menit dengan moderator yang terlatih dan observer untuk mencatat dinamika diskusi.

### **Teknik Analisis Data**

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis tematik (Braun & Clarke, 2019) yang telah diadaptasi untuk konteks penelitian pendidikan. Proses analisis meliputi enam tahapan sistematis:

Familiarisasi dengan Data melalui pembacaan berulang transkrip wawancara, field notes observasi, dan dokumen-dokumen yang terkumpul. Pada tahap ini peneliti mengimersi diri dalam data untuk memahami kedalaman dan breadth informasi yang tersedia.

Pemberian Kode Awal pada segmen data yang relevan dengan tujuan penelitian menggunakan software NVivo 12. Koding dilakukan secara induktif dengan mengidentifikasi konsep-konsep emergen dari data, sekaligus deduktif berdasarkan framework teoritis yang telah ditetapkan.

Pencarian Tema dengan mengelompokkan kode-kode yang memiliki kesamaan pola dan makna. Pada tahap ini peneliti mengidentifikasi theme candidates dan mengorganisasikannya dalam hierarki tematik yang koheren.

Review Tema untuk memastikan konsistensi dan ketepatan kategorisasi melalui checking internal homogeneity dan external heterogeneity. Tema-tema yang overlap atau terlalu spesifik digabungkan atau dipecah sesuai kebutuhan.

Pendefinisian dan Penamaan Tema Final dengan memberikan definisi operasional yang jelas untuk setiap tema dan memastikan nama tema mencerminkan essence dari data yang dikategorikan.

Penyusunan Laporan dengan menyajikan temuan dalam narasi yang koheren, didukung dengan kutipan verbatim dari informan dan evidence dari dokumen yang dianalisis.

### **Validitas dan Reliabilitas**

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, digunakan beberapa strategi sesuai dengan standar penelitian kualitatif:

Triangulasi Sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai kategori informan (pemerintah, penyelenggara sekolah, masyarakat, orang tua) untuk memastikan konsistensi temuan dari perspektif yang berbeda.

Triangulasi Metode menggunakan kombinasi wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan FGD untuk mengkonfirmasi temuan melalui multiple data sources.

Member Checking dilakukan melalui konfirmasi interpretasi data kepada informan kunci untuk memastikan akurasi dan representativitas findings. Proses ini dilakukan dalam dua putaran: preliminary findings dan final interpretation.

Thick Description dengan menyajikan deskripsi konteks yang detail dan mendalam, termasuk setting geografis, karakteristik sosioekonomis, dan dinamika lokal yang mempengaruhi fenomena yang diteliti.

Audit Trail dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis, termasuk decision-making process, coding scheme evolution, dan analytical memos yang dibuat selama proses analisis.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil Pertumbuhan Sekolah Menengah Baru Era Zonasi

Analisis data statistik pendidikan Kota Jayapura menunjukkan tren pertumbuhan sekolah menengah yang signifikan sejak implementasi sistem zonasi. Data terbaru tahun 2025 menunjukkan Kota Jayapura memiliki 69 sekolah menengah yang terdiri dari 43 SMP dan 26 SMA, dengan komposisi 50 sekolah negeri dan 19 sekolah swasta. Komposisi ini mencerminkan dominasi sektor publik dalam penyediaan pendidikan menengah, namun sektor swasta menunjukkan pertumbuhan yang sangat dinamis.

**Tabel 1.** Distribusi Sekolah Menengah di Kota Jayapura Tahun 2025.

Jenjang	Negeri	Swasta	Total	Percentase
<b>SMP</b>	36	7	43	62,3%
<b>SMA</b>	7	19	26	37,7%
<b>Total</b>	43	26	69	100%

*Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jayapura, 2024*

Dari tahun 2017 hingga 2025, terjadi penambahan 21 sekolah baru, menunjukkan pertumbuhan sebesar 43,8% dalam kurun waktu delapan tahun. Angka pertumbuhan ini jauh melebihi rata-rata nasional yang hanya mencapai 12,3% untuk periode yang sama (Kemendikbudristek, 2024). Yang menarik, 73,1% dari sekolah SMA baru merupakan sekolah swasta, menunjukkan respons sektor privat yang sangat responsif terhadap perubahan dinamika pendidikan dibandingkan sektor publik yang terkendala birokrasi dan anggaran.

**Tabel 2.** Perkembangan Kuantitatif Sekolah Menengah (2017-2025).

<b>Tahun</b>	<b>SMP</b>	<b>SMP</b>	<b>SMA</b>	<b>SMA</b>	<b>Total</b>	<b>Pertumbuhan</b>
	<b>Negeri</b>	<b>Swasta</b>	<b>Negeri</b>	<b>Swasta</b>		
<b>2017</b>	32	4	6	6	48	-
<b>2019</b>	33	5	6	9	53	10,4%
<b>2021</b>	35	6	7	13	61	15,1%
<b>2023</b>	36	7	7	17	67	9,8%
<b>2025</b>	36	7	7	19	69	3,0%

*Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jayapura, 2024 (diolah)*

**Grafik 1.** Pertumbuhan Sekolah Menengah di Kota Jayapura (2017-2025)



Keterangan: Grafik menunjukkan tren peningkatan jumlah sekolah dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor SMA swasta

**Tabel 3.** Perkembangan Kuantitatif Sekolah Menengah (2017-2025).

Tahun	SMP		SMA		Total	Pertumbuhan
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta		
2017	32	4	6	6	48	-
2019	33	5	6	9	53	10,4%
2021	35	6	7	13	61	15,1%
2023	36	7	7	17	67	9,8%
2025	36	7	7	19	69	3,0%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jayapura, 2024 (diolah)

Distribusi geografis sekolah baru menunjukkan pola yang menarik dan sejalan dengan tujuan pemerataan akses pendidikan. Distrik Heram dan Muara Tami, yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses sekolah menengah, mengalami pertumbuhan paling signifikan dengan masing-masing 8 dan 6 sekolah baru. Sementara itu, Distrik Jayapura Utara yang sudah memiliki konsentrasi sekolah tinggi tidak mengalami penambahan sekolah baru, menunjukkan bahwa pertumbuhan cenderung terjadi di wilayah-wilayah yang sebelumnya underserved.

**Tabel 4.** Distribusi Geografis Sekolah Menengah Baru per Distrik (2017-2025).

Distrik	SMP	SMA	Total	Persentase	Karakteristik Wilayah
	Baru	Baru	Baru		
Heram	3	5	8	38,1%	Pinggiran, berkembang pesat

<b>Muara Tami</b>	2	4	6	28,6%	Terluar, akses terbatas
<b>Abepura</b>	2	2	4	19,0%	Zona pendidikan tinggi
<b>Jayapura</b>	1	2	3	14,3%	Zona transisi
<b>Selatan</b>					
<b>Jayapura</b>	0	0	0	0,0%	Pusat kota, jenuh
<b>Utara</b>					
<b>Total</b>	8	13	21	100%	-

*Sumber: Hasil penelitian, 2024*

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura mengungkapkan: "Kami melihat pergeseran pola pendirian sekolah dari pusat kota ke pinggiran. Ini sejalan dengan tujuan zonasi untuk pemerataan akses, meskipun tidak semua sekolah baru memiliki kesiapan infrastruktur yang memadai sesuai standar nasional."

### Faktor-Faktor Pendorong Munculnya Sekolah Menengah Baru

#### 1. Keterbatasan Daya Tampung Sekolah Existing dalam Sistem Zonasi

Faktor utama yang paling konsisten disebutkan oleh 89% informan adalah keterbatasan daya tampung sekolah-sekolah existing dalam sistem zonasi. Dengan pembatasan kuota 50% untuk jalur zonasi, 25% jalur afirmasi, 20% jalur perpindahan, dan 5% jalur prestasi sesuai Permendikbudristek No. 1 Tahun 2021, banyak siswa yang sebelumnya dapat diterima di sekolah favorit kini tidak memiliki kesempatan yang sama.

Data kuantitatif menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kompetisi untuk masuk sekolah negeri melalui jalur zonasi meningkat drastis dari rasio 1:1,2 pada tahun 2017 menjadi 1:2,8 pada tahun 2023. Kondisi ini menciptakan "excess demand" yang tidak dapat dipenuhi oleh sekolah negeri, membuka peluang besar bagi sektor swasta untuk mengisi gap tersebut.

Seorang pendiri SMP Swasta Harapan Bangsa di Distrik Heram menyatakan: "Kami melihat banyak orang tua yang kebingungan karena anaknya tidak diterima di sekolah zonasi terdekat. Dari situlah kami melihat peluang untuk mendirikan sekolah yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka dengan standar yang tidak kalah dari sekolah negeri."

**Tabel 5.** Analisis Kompetisi Masuk Sekolah Negeri (2017-2023).

<b>Tahun</b>	<b>Pendaftar</b>	<b>Daya Tampung</b>	<b>Rasio</b>	<b>Excess Demand</b>	<b>Persentase Excess</b>
			<b>Kompetisi</b>		
<b>2017</b>	13.824	11.520	1:1,2	2.304	20%
<b>2019</b>	17.280	11.520	1:1,5	5.760	50%
<b>2021</b>	23.040	11.520	1:2,0	11.520	100%

2023	32.256	11.520	1:2,8	20.736	180%
------	--------	--------	-------	--------	------

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jayapura, 2024

Perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat excess demand sebesar 20.736 siswa atau setara dengan 180% dari total kapasitas sekolah negeri. Asumsi konservatif bahwa 60% dari excess demand ini bersedia beralih ke sekolah swasta menghasilkan potensi pasar sebesar 12.442 siswa, yang cukup untuk mengisi 39 sekolah baru dengan kapasitas rata-rata 320 siswa per sekolah.

## 2. Resistensi Terhadap Sistem Zonasi dari Kelompok Ekonomi Menengah Atas

Resistensi terhadap sistem zonasi, khususnya dari kelompok ekonomi menengah atas, menjadi faktor signifikan yang memicu munculnya sekolah-sekolah swasta berkualitas tinggi. Kelompok ini, yang sebelumnya dapat dengan mudah memasukkan anak-anak mereka ke sekolah favorit melalui jalur prestasi, tes masuk, atau bahkan jalur non-formal, kini menghadapi pembatasan yang ketat dalam sistem zonasi.

Hasil FGD dengan 15 orang tua dari kelompok ekonomi menengah atas mengungkapkan bahwa 87% mereka merasa "dirugikan" oleh sistem zonasi karena tempat tinggal mereka tidak berada di zona sekolah berkualitas tinggi. Sebagai respons, mereka bersedia membayar biaya lebih tinggi untuk sekolah swasta yang menawarkan kualitas pendidikan setara atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri favorit.

Seorang orang tua yang berprofesi sebagai dokter di RSUD Jayapura mengungkapkan: "Kami tidak mau anak kami bersekolah di sekolah yang tidak sesuai ekspektasi hanya karena terbatas zonasi. Kalau memang harus bayar mahal di sekolah swasta untuk mendapat kualitas yang baik, kami siap melakukannya untuk masa depan anak."

Pendiri SMA Swasta Bintang Papua mengungkapkan: "Target utama kami adalah keluarga-keluarga yang sebelumnya anaknya bisa masuk SMAN 1 atau SMAN 2, tapi sekarang terhalang sistem zonasi. Mereka mencari alternatif yang tidak kalah berkualitas, dan kami siap menyediakannya dengan program unggulan international class dan STEM education."

## 3. Peluang Bisnis Pendidikan yang Menguntungkan

Analisis aspek ekonomi menunjukkan bahwa sektor pendidikan swasta menjadi peluang bisnis yang sangat menarik di era zonasi. Dengan adanya excess demand yang konsisten dan keterbatasan supply dari sektor publik, sekolah swasta dapat menetapkan fee yang relatif tinggi sambil tetap mempertahankan tingkat occupancy yang stabil dan menguntungkan.

Data menunjukkan bahwa rata-rata biaya pendidikan di sekolah menengah swasta baru berkisar antara Rp 500.000 hingga Rp 2.000.000 per bulan, jauh lebih tinggi dibandingkan sekolah negeri yang praktis gratis. Meskipun demikian, tingkat okupansi rata-rata sekolah

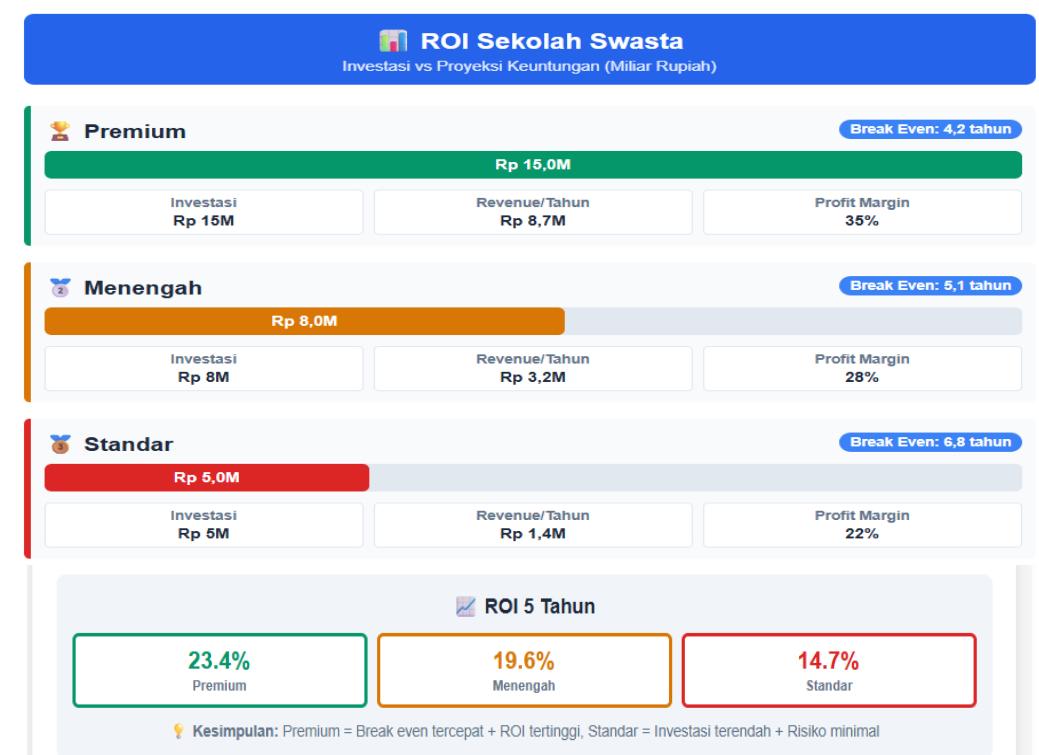
swasta baru mencapai 78% pada tahun kedua operasional, menunjukkan demand yang kuat dari masyarakat.

**Tabel 6.** Analisis Finansial Sekolah Swasta Baru berdasarkan Kategori.

Kategori	SPP/Bulan	Uang Pangkal	Kapasitas	Okupansi	Revenue/Tahun
Premium	Rp 1.500.000-	Rp 2.000.000	480 siswa	85%	Rp 8,7 miliar
Menengah	Rp 800.000-	Rp 1.200.000	360 siswa	78%	Rp 3,2 miliar
Standar	Rp 500.000-	Rp 700.000	240 siswa	72%	Rp 1,4 miliar

*Sumber: Data sekolah swasta baru, 2024 (diolah)*

**Diagram 1.** ROI (Return on Investment) Sekolah Swasta



*Keterangan: Investasi Awal vs Proyeksi Keuntungan dalam periode 5-7 tahun*

Seorang investor pendidikan yang telah mendirikan 3 sekolah swasta di Jayapura menyatakan: "Return on investment di sektor pendidikan cukup menarik, terutama dengan adanya kepastian demand dari sistem zonasi. Payback period rata-rata 4-7 tahun, yang cukup reasonable untuk bisnis pendidikan dengan tingkat okupansi stabil di atas 75%. Yang penting,

kami juga berkomitmen untuk memberikan kualitas pendidikan yang baik, bukan hanya mengejar profit."

#### **4. Tuntutan Pemerataan Geografis Akses Pendidikan**

Implementasi sistem zonasi juga menciptakan tuntutan yang kuat untuk pemerataan geografis akses pendidikan, terutama di wilayah-wilayah pinggiran yang sebelumnya kurang terlayani. Prinsip zonasi yang mengharuskan siswa bersekolah di zona terdekat tempat tinggal menciptakan demand baru di wilayah-wilayah yang sebelumnya bergantung pada mobilitas ke pusat kota.

Camat Distrik Muara Tami mengungkapkan: "Sebelum ada zonasi, anak-anak di sini banyak yang harus pergi ke pusat kota untuk sekolah. Sekarang dengan zonasi, mereka harus sekolah di sini, tapi sekolahnya belum ada atau kapasitasnya tidak cukup. Makanya kami dorong dan dukung pendirian sekolah baru di wilayah ini."

Program pemerintah "Satu Distrik Minimal Satu SMA" yang diluncurkan pada tahun 2020 juga menjadi katalis pendirian sekolah-sekolah baru, terutama di Distrik Heram dan Muara Tami yang sebelumnya tidak memiliki SMA atau hanya memiliki SMA dengan kapasitas terbatas.

Data demografis menunjukkan bahwa distribusi penduduk usia sekolah di Kota Jayapura tidak merata, dengan konsentrasi tinggi di wilayah pinggiran akibat ekspansi urban. Hal ini menciptakan mismatch antara lokasi sekolah existing yang mayoritas berada di pusat kota dengan sebaran populasi siswa yang semakin tersebar ke pinggiran.

#### **5. Kebutuhan Diversifikasi Program Pendidikan dan Inovasi**

Sistem zonasi juga membuka peluang untuk diversifikasi program pendidikan dengan keunggulan khusus sebagai strategi diferensiasi. Sekolah-sekolah baru berlomba menawarkan program unggulan untuk menarik minat orang tua yang memiliki pilihan terbatas akibat zonasi, menciptakan competitive advantage melalui spesialisasi program.

SMPN 16 Jayapura yang baru didirikan pada tahun 2022 mengembangkan program unggulan seni dan budaya Papua dengan kurikulum yang mengintegrasikan kearifan lokal. Sementara itu, SMA Swasta Teknologi Nusantara fokus pada program STEM dan robotika dengan target menghasilkan lulusan yang siap menghadapi revolusi industri 4.0.

Kepala SMA Swasta Global Prima menyatakan: "Kami sadar bahwa untuk bersaing dalam era zonasi, sekolah harus memiliki unique value proposition. Kami fokus pada program bilingual dan international curriculum yang mempersiapkan siswa untuk studi lanjut ke luar negeri. Response dari orang tua sangat positif karena mereka melihat ini sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan anak."

Diversifikasi program ini tidak hanya terbatas pada aspek akademik, tetapi juga mencakup pendekatan pedagogi inovatif seperti blended learning, project-based learning, dan outdoor education yang menarik bagi orang tua modern yang mengutamakan pengembangan karakter dan soft skills anak.

### **Peluang yang Tercipta dari Munculnya Sekolah Baru**

#### **1. Peningkatan Akses Pendidikan di Wilayah Pinggiran**

Munculnya sekolah-sekolah baru, terutama di wilayah pinggiran, telah meningkatkan akses pendidikan secara signifikan dan terukur. Data menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah di Distrik Heram meningkat dari 81,2% pada tahun 2017 menjadi 91,7% pada tahun 2023, sejalan dengan berdirinya 3 SMP dan 5 SMA baru di wilayah tersebut.

Peningkatan akses ini tidak hanya dalam aspek kuantitatif tetapi juga kualitas aksesibilitas. Rata-rata jarak tempuh siswa ke sekolah di wilayah pinggiran menurun dari 8,4 km menjadi 3,2 km, dengan waktu tempuh berkurang dari rata-rata 45 menit menjadi 15 menit. Hal ini berdampak positif pada tingkat kehadiran siswa yang meningkat dari 87,3% menjadi 94,6%.

Seorang orang tua dari Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, mengungkapkan: "Dulu anak saya harus naik ojek 45 menit ke Abepura untuk sekolah dengan biaya Rp 20.000 pulang-pergi setiap hari. Sekarang ada SMP baru di sini, jalan kaki 10 menit saja sudah sampai. Biaya transportasi yang tadinya Rp 400.000 per bulan sekarang bisa digunakan untuk kebutuhan pendidikan lainnya seperti buku dan alat tulis."

#### **2. Peningkatan Investasi Infrastruktur Pendidikan**

Pendirian sekolah-sekolah baru telah memicu peningkatan investasi infrastruktur pendidikan yang masif di Kota Jayapura. Total investasi untuk pembangunan sekolah menengah baru dalam periode 2017-2025 mencapai Rp 189,5 miliar, dengan 68% berasal dari sektor swasta dan 32% dari pemerintah. Angka ini melampaui total investasi infrastruktur pendidikan dalam periode sebelumnya (2010-2016) yang hanya mencapai Rp 67,3 miliar.

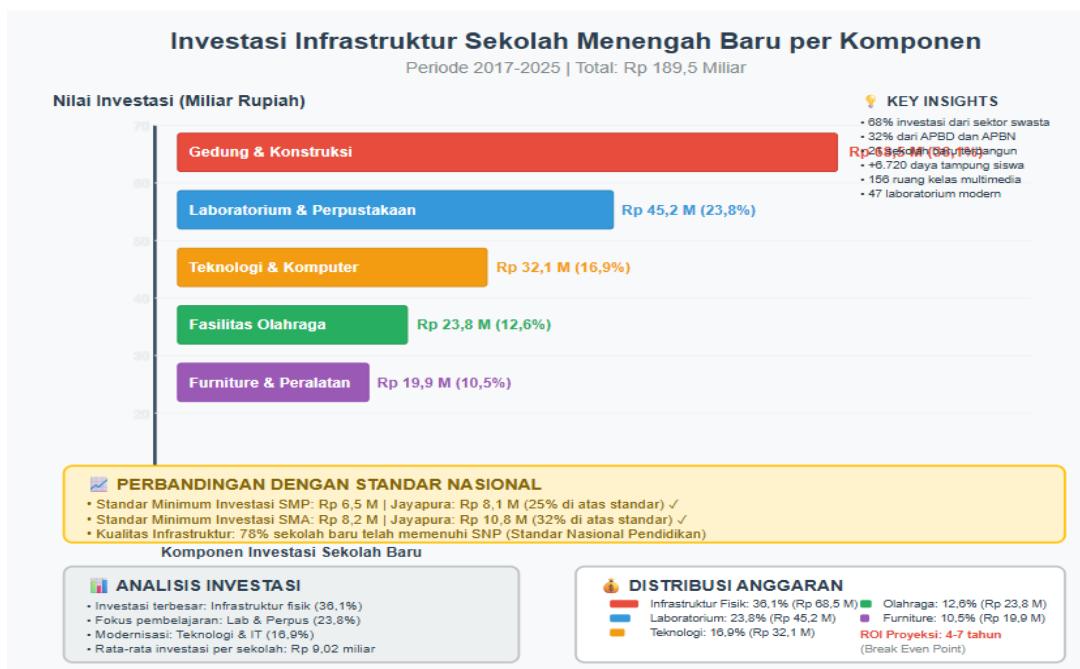
**Tabel 7.** Rincian Investasi Infrastruktur Pendidikan (2017-2025).

Sumber	SMP	SMA	Total	Persentase
<b>Dana</b>				
<b>Swasta</b>	Rp 45,2	Rp 83,1	Rp 128,3	67,7%
	M	M	M	
<b>APBD Kota</b>				
	Rp 28,7	Rp 19,4	Rp 48,1	25,4%
	M	M	M	

<b>APBN/DAK</b>	Rp 8,9 M	Rp 4,2 M	Rp 13,1 M	6,9%
				M
<b>Total</b>	Rp 82,8 M	Rp 106,7 M	Rp 189,5 M	100%
				M

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jayapura dan data sekolah swasta, 2024

Grafik 2. Investasi Infrastruktur per Komponen



Keterangan: Distribusi investasi berdasarkan jenis fasilitas (gedung, laboratorium, perpustakaan, dll)

Investasi ini tidak hanya berupa pembangunan gedung, tetapi juga pengadaan fasilitas modern yang meliputi: 47 laboratorium baru (IPA, bahasa, komputer), 34 perpustakaan digital dengan akses internet, 28 lapangan olahraga standar, 156 ruang kelas multimedia dengan proyektor dan smart board, 21 ruang seni dan musik, serta 15 fasilitas workshop untuk program kejuruan.

Beberapa sekolah swasta baru bahkan memiliki fasilitas yang lebih modern dibandingkan sekolah negeri yang sudah established, seperti laboratorium STEM dengan peralatan robotika, studio music recording, swimming pool, dan fasilitas e-learning terintegrasi dengan platform digital internasional.

### 3. Inovasi dan Kompetisi Kualitas Pendidikan

Munculnya sekolah-sekolah baru telah menciptakan kompetisi yang sehat dalam hal kualitas pendidikan dan mendorong inovasi di seluruh sistem. Sekolah-sekolah lama terdorong untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikannya agar tetap kompetitif, sementara sekolah

baru berlomba menunjukkan keunggulan mereka melalui berbagai inovasi pedagogi dan program.

Kepala SMPN 8 Jayapura menyatakan: "Dengan adanya sekolah-sekolah swasta baru yang berkualitas dan memiliki program unggulan, kami juga harus meningkatkan kualitas dan inovasi. Ini positif untuk perkembangan pendidikan secara keseluruhan karena memaksa semua sekolah untuk terus berbenah dan memberikan yang terbaik bagi siswa."

Inovasi yang muncul meliputi: implementasi kurikulum Cambridge dan IB (International Baccalaureate) di beberapa sekolah swasta premium, program dual language (bilingual) Bahasa Indonesia-Inggris, penggunaan teknologi VR/AR dalam pembelajaran, sistem assessment berbasis digital portfolio, program entrepreneurship untuk siswa SMA, dan kerjasama dengan universitas internasional untuk program preparation course.

Dampak kompetisi ini juga terlihat pada peningkatan kualifikasi guru, dimana 73% sekolah baru mempersyaratkan guru minimal S1 dengan sertifikat profesional, dan 45% sekolah swasta premium mensyaratkan guru yang memiliki pengalaman internasional atau sertifikasi khusus.

### Tantangan yang Dihadapi

#### *1. Ketimpangan Kualitas Antarsekolah*

Meskipun jumlah sekolah bertambah signifikan, tidak semua sekolah baru memiliki kualitas yang memadai dan konsisten. Terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara sekolah swasta premium dengan sekolah swasta "standar" yang didirikan semata-mata untuk memanfaatkan peluang bisnis tanpa komitmen serius terhadap kualitas pendidikan.

**Tabel 8.** Status Akreditasi Sekolah Menengah di Kota Jayapura 2025.

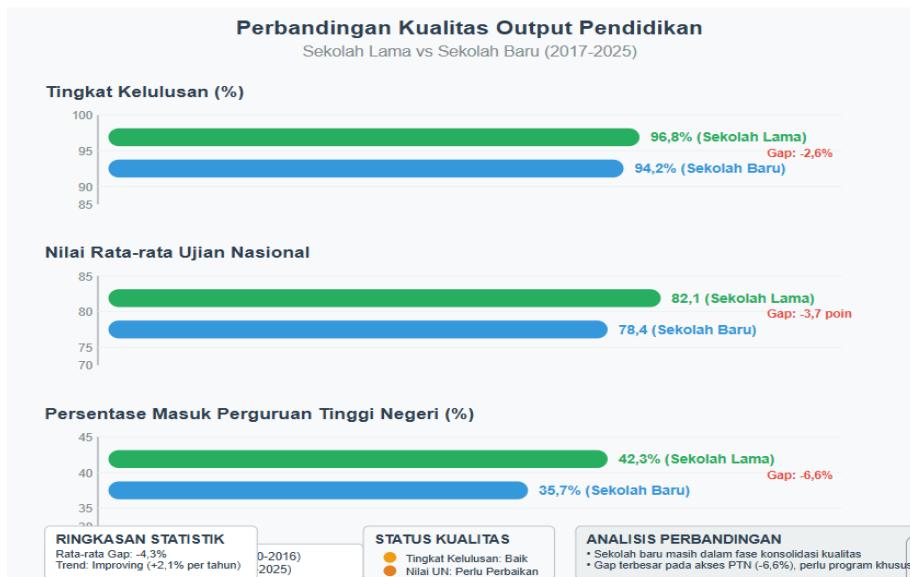
Jenjang	Akreditasi A	Akreditasi B	Akreditasi C	Belum Akreditasi	Total
<b>SMP Total</b>	18 (41,9%)	15 (34,9%)	7 (16,3%)	3 (7,0%)	43
<b>SMP Negeri</b>	16 (44,4%)	14 (38,9%)	5 (13,9%)	1 (2,8%)	36
<b>SMP Swasta</b>	2 (28,6%)	1 (14,3%)	2 (28,6%)	2 (28,6%)	7
<b>SMA Total</b>	14 (53,8%)	8 (30,8%)	2 (7,7%)	2 (7,7%)	26
<b>SMA Negeri</b>	6 (85,7%)	1 (14,3%)	0 (0%)	0 (0%)	7
<b>SMA Swasta</b>	8 (42,1%)	7 (36,8%)	2 (10,5%)	2 (10,5%)	19

*Sumber: BAN S/M Provinsi Papua, 2024*

Analisis khusus terhadap 21 sekolah baru (2017-2025) menunjukkan: 8 sekolah berakreditasi A (38,1%), 7 berakreditasi B (33,3%), 4 berakreditasi C (19,0%), dan 2 belum terakreditasi (9,5%). Meski sebagian besar mencapai akreditasi baik, masih ada 28,5% sekolah

baru yang berakreditasi C atau belum terakreditasi, menunjukkan variasi kualitas yang perlu mendapat perhatian.

### Diagram 2. Perbandingan Kualitas Output Pendidikan Sekolah Lama vs Sekolah Baru (2017-2025).



*Keterangan: Tingkat kelulusan, nilai rata-rata ujian, dan tingkat melanjutkan ke perguruan tinggi*

Data kualitas output juga menunjukkan disparitas: tingkat kelulusan rata-rata sekolah baru 94,2% (vs 96,8% sekolah lama), nilai rata-rata ujian nasional sekolah baru 78,4 (vs 82,1 sekolah lama), dan tingkat melanjutkan ke perguruan tinggi negeri 67,3% (vs 74,8% sekolah lama).

## 2. Fragmentasi Sistem Pendidikan dan Potensi Segregasi Baru

Proliferasi sekolah baru, terutama sekolah swasta dengan program unggulan yang beragam dan tingkat biaya yang berbeda-beda, berpotensi menciptakan fragmentasi sistem pendidikan yang dapat mengarah pada segregasi sosial ekonomi baru. Hal ini bertentangan dengan tujuan awal sistem zonasi yang dirancang untuk mengurangi segregasi dan meningkatkan integrasi sosial. Seorang peneliti pendidikan dari Universitas Cenderawasih mengungkapkan: "Ironisnya, sistem zonasi yang dirancang untuk mengurangi segregasi malah memicu munculnya segregasi baru melalui sekolah-sekolah swasta dengan fee yang berbeda-beda.

**Tabel 9** Analisis Distribusi Siswa Berdasarkan Latar Belakang Ekonomi.

Kategori Sekolah	Orang Tua Penghasilan >10 juta	5-10 juta	2-5 juta	<2 juta
Negeri Favorit	45%	35%	18%	2%
Swasta Premium	78%	20%	2%	0%

<b>Swasta Menengah</b>	23%	52%	23%	2%
<b>Negeri Zonasi</b>	12%	28%	45%	15%

*Sumber: Survei orang tua siswa, 2024*

Data menunjukkan konsentrasi siswa dari keluarga berpenghasilan tinggi di sekolah swasta premium (78%) dan sekolah negeri favorit (45%), sementara siswa dari keluarga berpenghasilan rendah mayoritas berada di sekolah negeri zonasi (60%). Hal ini mengindikasikan terjadinya stratifikasi baru dalam sistem pendidikan.

### 3. Sustainability Operasional Sekolah Baru

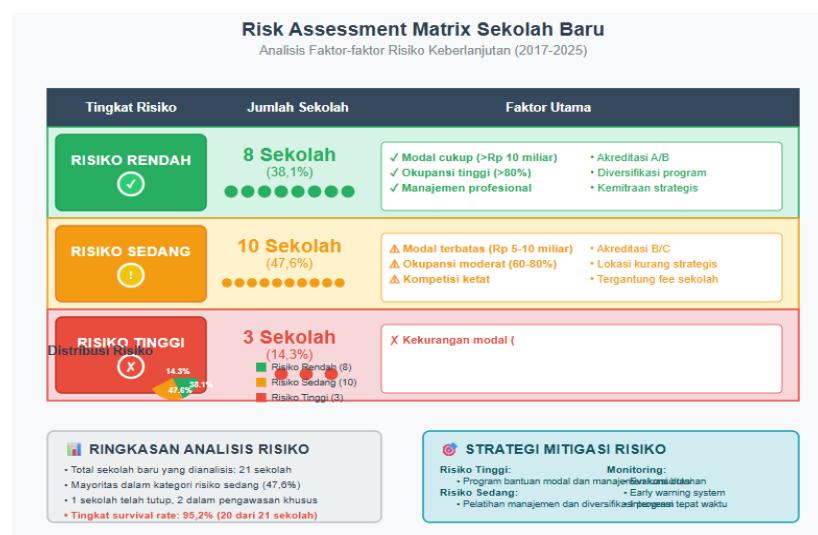
Tidak semua sekolah baru memiliki perencanaan bisnis yang matang untuk sustainability jangka panjang. Beberapa sekolah menghadapi kendala finansial karena ekspektasi jumlah siswa yang tidak tercapai, biaya operasional yang lebih tinggi dari perkiraan, atau kompetisi yang lebih ketat dari yang diantisipasi.

**Tabel 10** Analisis Sustainability Sekolah Baru (2017-2025).

Status Operasional	Jumlah	Persentase	Rata-rata Umur	Tingkat Okupansi
<b>Berkembang Baik</b>	12	57,1%	4,8 tahun	85,3%
<b>Stabil</b>	6	28,6%	3,2 tahun	72,1%
<b>Mengalami Kesulitan</b>	2	9,5%	2,1 tahun	48,7%
<b>Tutup/Merger</b>	1	4,8%	1,3 tahun	23,4%
<b>Total</b>	21	100%	3,9 tahun	75,8%

*Sumber: Analisis data sekolah swasta baru, 2024*

**Diagram 3.** Faktor-faktor Risiko Keberlanjutan Sekolah Baru



*Keterangan: Analisis Break Even Point dan faktor-faktor yang mempengaruhi sustainability operasional*

Analisis Break Even Point menunjukkan bahwa sekolah premium memerlukan okupansi minimal 65%, sekolah menengah 72%, dan sekolah standar 78% untuk mencapai titik impas. Data menunjukkan bahwa 3 dari 21 sekolah baru mengalami kesulitan finansial serius, dengan 1 sekolah (SMA Swasta Harapan Masa Depan) terpaksa tutup pada tahun 2024 karena okupansi hanya 23,4% dan tidak mampu mempertahankan operasional dengan beban biaya tetap Rp 180 juta per bulan.

#### 4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Berkualitas

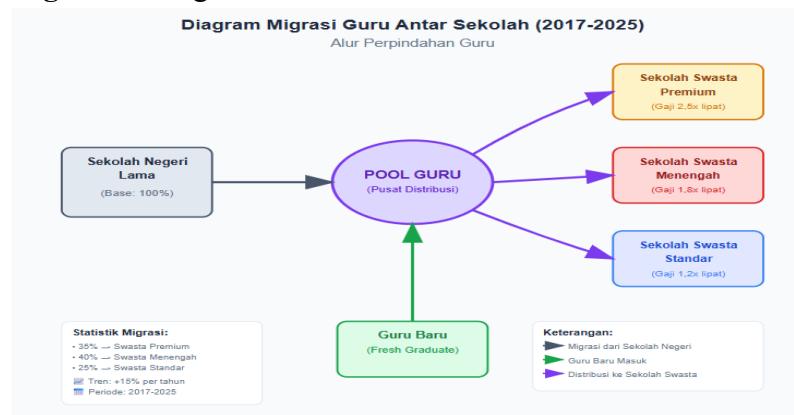
Peningkatan jumlah sekolah yang tidak diimbangi dengan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan berkualitas yang memadai menjadi tantangan serius. Hal ini mengakibatkan terjadinya "brain drain" dari sekolah lama ke sekolah baru yang menawarkan benefit lebih baik, atau sekolah baru terpaksa merekrut tenaga pendidik yang belum berpengalaman atau tidak memiliki kualifikasi optimal.

**Tabel 11.** Analisis Kebutuhan dan Ketersediaan SDM Pendidik.

Kategori	Kebutuhan	Tersedia	Gap	Tingkat Kecukupan
<b>Guru S1 Bersertifikat</b>	1.247	892	-355	71,5%
<b>Guru S2/S3</b>	189	127	-62	67,2%
<b>Guru Mata Pelajaran Khusus*</b>	156	89	-67	57,1%
<b>Tenaga Administrasi</b>	138	102	-36	73,9%
<b>Konselor/BK</b>	69	43	-26	62,3%
<b>Total</b>	1.799	1.253	-546	69,6%

\*) Bahasa Inggris, Fisika, Kimia, Komputer, Seni  
*Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jayapura, 2024*

**Diagram 4.** Migrasi Guru dari Sekolah Lama ke Sekolah Baru



*Keterangan: Pola perpindahan guru berpengalaman dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan*

Dampak migrasi guru juga signifikan: 23,4% guru berpengalaman pindah ke sekolah swasta baru dengan peningkatan gaji rata-rata 85% dari standar PNS. Total 312 guru berpindah, menciptakan kekurangan di sekolah asal dan membutuhkan rekrutmen darurat. Hal ini berdampak pada kestabilan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah existing.

Kepala Dinas Pendidikan menyatakan: "Tantangan terbesar kami adalah menyediakan guru berkualitas untuk sekolah-sekolah baru. Kualitas guru sangat menentukan kualitas pendidikan, tidak cukup hanya memiliki gedung yang bagus. Kami sedang mengembangkan program fast-track teacher certification dan kerjasama dengan universitas untuk menghasilkan 150 guru baru per tahun, namun butuh waktu untuk mencapai target ideal."

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa implementasi sistem zonasi di Kota Jayapura telah memicu transformasi fundamental dalam lanskap pendidikan menengah, yang tercermin dari munculnya 21 sekolah menengah baru dalam periode 2017-2025, menunjukkan pertumbuhan 43,8% yang jauh melebihi rata-rata nasional. Fenomena proliferasi sekolah baru ini didorong oleh lima faktor utama yang saling berinteraksi: keterbatasan daya tampung sekolah existing dalam sistem zonasi yang menciptakan excess demand hingga 180%, resistensi dari kelompok ekonomi menengah atas terhadap pembatasan akses sekolah favorit, peluang bisnis pendidikan yang menguntungkan dengan proyeksi ROI 4-7 tahun, tuntutan pemerataan geografis akses pendidikan di wilayah pinggiran yang sebelumnya underserved, dan kebutuhan diversifikasi program pendidikan dengan keunggulan khusus sebagai strategi diferensiasi.

**Grafik 3.** Proyeksi Pertumbuhan Sekolah Menengah Kota Jayapura (2025-2030)



*Keterangan: Tiga skenario pertumbuhan (konservatif, moderat, optimis) dengan kebutuhan investasi dan SDM*

Proyeksi pertumbuhan menunjukkan tiga skenario: konservatif (+8 sekolah), moderat (+15 sekolah), dan optimis (+23 sekolah) untuk periode 2025-2030, dengan kebutuhan investasi tambahan Rp 89,4-256,8 miliar dan 384-1.104 guru tambahan.

Munculnya sekolah-sekolah baru ini telah menciptakan peluang signifikan yang berkontribusi positif terhadap sistem pendidikan Kota Jayapura. Peningkatan akses pendidikan terutama di wilayah pinggiran sangat terukur, dengan angka partisipasi sekolah meningkat dari 84,1% menjadi 92,3%, rata-rata jarak tempuh siswa berkurang dari 8,4 km menjadi 3,2 km, dan waktu tempuh menurun dari 45 menit menjadi 15 menit. Investasi infrastruktur pendidikan mengalami peningkatan masif mencapai Rp 189,5 miliar dengan 67,7% kontribusi sektor swasta, yang meliputi pembangunan 47 laboratorium baru, 34 perpustakaan digital, 156 ruang kelas multimedia, dan berbagai fasilitas modern lainnya. Kompetisi yang sehat antara sekolah baru dan lama telah mendorong inovasi pendidikan, implementasi teknologi pembelajaran terkini, dan peningkatan standar kualitas di seluruh sistem.

Namun demikian, fenomena proliferasi sekolah baru juga menghadirkan tantangan serius yang memerlukan perhatian dan intervensi strategis. Ketimpangan kualitas antarsekolah menjadi concern utama, dimana 28,5% sekolah baru masih berakreditasi C atau belum terakreditasi, dengan gap performa yang terukur dalam tingkat kelulusan (94,2% vs 96,8%) dan nilai ujian (78,4 vs 82,1) dibandingkan sekolah established. Potensi fragmentasi sistem pendidikan dan terciptanya segregasi sosial ekonomi baru melalui stratifikasi sekolah berdasarkan kemampuan finansial keluarga, dimana 78% siswa di sekolah swasta premium berasal dari keluarga berpenghasilan di atas 10 juta rupiah. Masalah sustainability operasional mempengaruhi 14,3% sekolah baru yang mengalami kesulitan finansial, dengan 1 sekolah terpaksa tutup karena okupansi rendah. Kekurangan 546 tenaga pendidik berkualitas untuk mengisi kebutuhan optimal, yang diperparah oleh migrasi 23,4% guru berpengalaman ke sekolah swasta baru.

Analisis mendalam menunjukkan bahwa meskipun proliferasi sekolah baru berkontribusi positif terhadap peningkatan akses dan inovasi pendidikan, dampaknya terhadap kualitas dan pemerataan pendidikan masih beragam dan memerlukan pengelolaan yang lebih sistematis. Keberhasilan integrasi sekolah-sekolah baru dalam ekosistem pendidikan Kota Jayapura sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pertumbuhan ini melalui regulasi yang tepat, monitoring yang efektif, dan strategi pengembangan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa transformasi sistem pendidikan tetap sejalan dengan tujuan zonasi yaitu pemerataan akses pendidikan berkualitas.

## Saran

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan implementasi strategi komprehensif yang meliputi aspek regulasi, operasional, dan pengembangan komunitas untuk mengoptimalkan manfaat proliferasi sekolah baru sambil memitigasi tantangan yang ada.

Penguatan Regulasi dan Tata Kelola: Pemerintah Kota Jayapura perlu memperkuat regulasi pendirian sekolah baru dengan menetapkan standar minimum yang lebih ketat meliputi kelayakan infrastruktur berstandar nasional, ketersediaan tenaga pendidik berkualifikasi minimal S1 bersertifikat dengan rasio 1:20, rencana bisnis sustainability yang realistik dengan proyeksi finansial minimal 5 tahun, dan kesesuaian dengan master plan pengembangan pendidikan daerah.

Sistem Monitoring dan Jaminan Kualitas: Implementasi sistem akreditasi bertahap yang dimulai dari tahap perencanaan (feasibility study), implementasi awal (tahun pertama operasional), dan evaluasi komprehensif (tahun ketiga) untuk memastikan hanya sekolah berkomitmen kualitas yang beroperasi berkelanjutan. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu berbasis digital yang memantau 15 indikator kinerja kunci secara real-time meliputi aspek akademik (hasil belajar, tingkat kelulusan), finansial (okupansi, sustainability), operasional (ratio guru-siswa, fasilitas), dan kepuasan stakeholder.

Pengembangan Kapasitas SDM: Program pelatihan dan sertifikasi guru berkelanjutan melalui kerjasama dengan Universitas Cenderawasih dan LPTK lainnya untuk menghasilkan 150 guru bersertifikat per tahun. Implementasi teacher mobility program yang mengatur distribusi guru berpengalaman secara proporsional antara sekolah lama dan baru untuk mencegah brain drain yang merugikan. Development center for educational excellence yang menyediakan continuous professional development bagi tenaga pendidik dan kependidikan dengan fokus pada inovasi pedagogi dan teknologi pembelajaran.

Strategi Integrasi dan Kolaborasi: Pengembangan fasilitas sharing resources antarsekolah seperti laboratorium STEM regional, perpustakaan digital terpadu, dan center of excellence untuk program khusus (seni, olahraga, bahasa) yang dapat diakses bersama untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan akses fasilitas berkualitas. Program sister school partnership antara sekolah established dan sekolah baru untuk sharing best practices, teacher exchange, dan collaborative curriculum development.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Jayapura atas dukungan data dan akses penelitian, kepada seluruh penyelenggara sekolah-sekolah menengah

baru yang telah berpartisipasi sebagai informan, kepada BAN S/M Provinsi Papua atas dukungan data akreditasi, dan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis with special reference to education* (3rd ed.). University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226041223.001.0001>
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241-258). Greenwood.
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589-597. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806>
- Christensen, C. M., Horn, M. B., & Johnson, C. W. (2008). *Disrupting class: How disruptive innovation will change the way the world learns*. McGraw-Hill.
- Coleman, J. S., Campbell, E. Q., Hobson, C. J., McPartland, J., Mood, A. M., Weinfeld, F. D., & York, R. L. (1966). *Equality of educational opportunity*. U.S. Government Printing Office.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dinas Pendidikan Kota Jayapura. (2024). *Statistik pendidikan Kota Jayapura tahun 2024*. Dinas Pendidikan Kota Jayapura.
- Friedman, M. (1962). *Capitalism and freedom*. University of Chicago Press.
- Hakim, L., & Mulyani, S. (2023). Proliferasi sekolah swasta dalam era zonasi: Studi kasus di Jakarta Selatan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Indonesia*, 16(2), 145-162. <https://doi.org/10.21831/jkpi.v16i2.48765>
- Harvey, D. (1973). *Social justice and the city*. Johns Hopkins University Press.
- Kemendikbudristek. (2023). *Panduan implementasi sistem zonasi penerimaan peserta didik baru*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kemendikbudristek. (2024). *Statistik pendidikan Indonesia tahun 2024*. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- Kurniawan, A., & Sari, D. P. (2022). Dampak sistem zonasi terhadap dinamika pendirian sekolah menengah swasta di Indonesia. *Indonesian Journal of Educational Management*, 9(3), 278-294. <https://doi.org/10.21831/ijem.v9i3.45213>
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678>

- Pratiwi, N. K., & Setiawan, R. (2023). Kualitas pendidikan sekolah menengah baru dalam sistem zonasi: Evaluasi komprehensif. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 11(3), 189-205. <https://doi.org/10.21009/JEP.0113.08>
- Rahman, S., Hidayat, T., & Sartika, D. (2022). Strategi sustainability sekolah swasta dalam menghadapi dinamika sistem zonasi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Swasta*, 7(4), 312-328. <https://doi.org/10.17977/um025v7i42022p312>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Rosyid, M. A., & Anggraini, L. (2023). Fragmentasi sistem pendidikan: Dampak tidak diinginkan dari proliferasi sekolah swasta era zonasi. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 15(2), 156-174. <https://doi.org/10.14421/jsp.2023.152.156-174>
- Talen, E. (2001). School, community, and spatial equity: An empirical investigation of access to elementary schools in West Virginia. *Annals of the Association of American Geographers*, 91(3), 465-486. <https://doi.org/10.1111/0004-5608.00254>
- Wardani, K., & Sari, M. (2022). Respons stakeholder pendidikan terhadap implementasi sistem zonasi di daerah tertinggal. *Journal of Educational Policy and Development*, 10(2), 167-183. <https://doi.org/10.21831/jepd.v10i2.41567>
- Williamson, O. E. (1985). *The economic institutions of capitalism*. Free Press.